

## **RESPONSIFITAS PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS DI DESA LONG PUJUNGAN KECAMATAN PUJUNGAN KABUPATEN MALINAU)**

**Nechson Foret Solaiman**

### **ABSTRAK**

*Nechson Foret Solaiman, Responsifitas pemerintah dalam pembangunan di daerah (studi kasus di Desa long pujungan kecamatan pujungan kabupaten malinau) dibawah bimbingan Drs.H.Burhannudin,M.Si. dan Drs.Endang Erawan,M.Si*

*Penelitian ini dilaksanakan di Desa long pujungan kecamatan pujungan Kabupaten malinau. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari kepala Desa, Ketua Dan Anggota BPD, Ketua RT (I,II,III,IV), Toko Masyarakat di Desa long pujungan.Data-data yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan analisis kualitatif.*

*Hasil temuan dari penelitian ini yaitu Responsifitas pemerintah dalam pembangunan di daerah di Desa Long Pujungan terutama didalam Pelaksanaan Musrenbang di tingkat Desa Belum maksimal dan masih jauh dari yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Musrenbang desa Tahun 2011 dimana masih kurang mendapatkan tanggapan dari pemerintah daerah (desa), dimana dapat dilihat dari usulan-usulan dari masyarakat mulai dari tingkat RT hingga tingkat desa hanya sedikit yang diterima, dikarenakan pemerintah daerah (desa) masih kurang merespon apa yang menjadi keinginan dari masyarakat.*

***Katakunci*** :*Responsifitas pemerintah, Musrenbang Desa, Pembangunan Daerah*

### **pendahuluan**

Responsifitas pemerintah sangat penting peranya terhadap pembangunan Secara konseptual-retorik, responsifitas telah diterima secara luas sebagai watak pemerintahan yang hendak diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan pembangunan didaerah.Pemerintahan yang hendak diwujudkan adalah yang memiliki kapasitas merespon permasalahan publik secara cepat, tetap dan akurat melalui langkah-langkah kebijakan yang diambil. Responsifitas pemerintah dikembangkan dengan cara memastikan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada, termasuk lembaga perwakilan rakyat, bisa memberikan respon dalam skala, bentuk, kecepatan, cara dan urutan yang tepat, sesuai dengan keadaan yang

dihadapi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Melalui kebijakan-kebijakan yang diambilnya, pemerintah (dalam arti luas) termasuk lembaga-lembaga perwakilan rakyat, dituntut untuk bisa membuat keputusan yang tepat, baik diminta ataupun tidak. Responsifitas tidak mensyaratkan adanya partisipasi, meskipun partisipasi publik menuntut responsifitas pemerintah.

Menurut Guru besar ilmu pemerintahan UGM Purwo Santoso responsifitas pemerintah difahami sebagai kualitas individual dan kelembagaan, kalau bukan kapasitas sistemik, dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi; pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pembangunan sebagai usaha untuk mencapai kemajuan telah menjadi program utama diberbagai wilayah termasuk di desa dimana pembangunan ini tidak hanya mencakup satu bidang, akan tetapi mencakup berbagai bidang secara bertahap dengan perencanaan yang matang. Untuk menciptakan pembangunan yang adil dan merata sangat diperlukan responsifitas dari pemerintahan kabupaten,kecamatan,dan lebih khusus nya pemerintahan Desa yang terarah dan dilaksanakan secara terpadu.

Pelibatan dari masyarakat pada setiap tahapan pembangunan,dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan dan pemeliharaan akan sangat membantu dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Dimana pelibatan dari masyarakat baik secara langsung maupun perwakilan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana dengan adanya pelibatan dari Masyarakat, masyarakat akan menyadari bahwa pembangunan tersebut memang untuk mereka sendiri,sehingga mereka akan merasa ikut memiliki, karena apa yang di inginkan oleh masyarakat merupakan usulan dari mereka pada musrenbang. Dengan adanya musrenbang desa pengelolaan/pengembangan sarana dan perasaranadiharapkan dapat dilaksanakan melalui peran serta masyarakat yang lebih besar lagi.

Sebagai penjabaran visi, misi dan program pembangunan, Pemda kabupaten Malinau telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau 2011- 2016 yang memiliki *time frame* lima tahun. Dalam penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Malinau tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Selain mengacu kepada RPJPD, penyusunan RPJMD tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi Kaltim 2008-2013 dan RPJM nasional tahun 2009-2014.Hal ini agar tercipta keselarasan pembangunan antara kabupaten, provinsi dan nasional.

Dilihat dari segi pembangunan di daerah kabupaten malinau ini maka penulis melihat pembangunan di desa Long Pujungan kecamatan pujungan kabupaten malinau ini sangatlah kurang mendapat perhatian dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah Desa, Dimana yang penulis lihat di desa long pujungan yang merupakan kecamatan yang sudah ada semejak belum dimekarkan nya kabupaten malinau tetapi dilihat dari pembangunan di desa ini sangat

berbeda dengan desa yang ada di kecamatan-kecamatan disekitar kecamatan pujungan. Dimana selama ini usulan-usulan dari masyarakat serta partisipasi dari masyarakat pada Musrenbang desa tahun 2011 sangat sedikit yang diterima dalam musrenbang desa long pujungan

Maka dari pada itu penulis mempunyai analisa sementara bahwa Responsivitas Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur Di Desa Long Pujungan kecamatan pujungan kabupaten malinau ini masih sangat kurang disegi pembangunan infrastruktur. Hal ini dikarenakan kurangnya Sensitivitas dari pemerintah daerah (khusus nya pemerintah desa) dalam merespon terhadap apa yang dirumuskan atau diinginkan oleh masyarakat melalui usulan-usulan dalam Musrenbang yang dilaksanakan oleh pemerintah yang ada di desa. Oleh karena itu, dengan kurangnya resposifitas pemerintah terhadap apa yang dirumuskan masyarakat. Maka menjadikan apa yang diinginkan atau dirumuskan masyarakat melalui musrenbang tidak tercapai, hal inilah yang menyebabkan segala sesuatu yang diharapkan masyarakat tidak terpenuhi sehingga berdampak gagalnya program yang telah dirumuskan masyarakat tersebut sebelumnya.

Berangkat dari permasalahan diatas maka penulis ingin meneliti apa saja yang menjadi penyebab kurangnya “*Responsifitas Pemerintah dalam pembangunan Daerah (studi Kasus didesa long pujungan kecamatan pujungan Kabupaten Malinau)*”

## **Teori dan Konsep**

Secara metedologis bahwa setiap penelitian, apabila masalah penelitian telah diketahui teori-teori dan konsepnya maka masalah dalam penelitian secara ilmiah dapat diidentifikasi, dapat dirumuskan pemecahan masalahnya berdasarkan metodologi yang sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh penulis dengan penyusunan secara sistematis

### **1. Responsifitas**

#### **1.1 Pengertian Responsifitas**

Responsifitas pemerintah daerah (desa) merupakan kemampuan dalam mengantisipasi dan menanggapi aspirasi baru, kebutuhan baru dan tuntutan baru dari masyarakat dalam Musrenbang ditingkat desa.

#### **1.2 Pemerintah Desa**

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari undang-undang yang lama yang perna ada yang mengatur desa, yaitu *inlandsche geneente ordonantie* (IGO) yang berlaku untuk jawa dan madura dan *inlandsche geneente ordonantie*(IGO) yang berlaku untuk diluar jawa dan madura. Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh kearah kemajuan yang dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang sekarang ini bentuk dan coraknya masih beraneka ragam. Masin-masing masih memiliki ciri-ciri nya

sendiri yang kadang-kadang “dianggap” merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif, guna peningkatan taraf hidupnya.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 berbunyi: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan meningkatkan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa.

## **2. Pembangunan**

### **2.1 Pengertian pembangunan**

Pembangunan adalah proses kegiatan atau usaha mengarah ke yang lebih baik membawa dampak yang positif kepada masyarakat dimana dalam perencanaannya dilakukan secara matang baik berbentuk fisik maupun non fisik dengan memperhatikan apa yang ada yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan azas-azas pembangunan harus bisa dan mampu memberikan perubahan bagi kelangsungan hidup masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

### **1.2. Tujuan pembangunan**

Menurut Raharjo Adisasmita, 2006:126, dalam mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat terdapat paling sedikit empat jenis strategi:

1. Strategi pembangunan (*growth strategy*)
2. Strategi Kesejahteraan (*welfare strategy*)
  1. Strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*responsive Strategy*)
  4. Strategi terpadu atau strategi yang menyeluruh (*integrated or holistic strategy*)

Adapun tujuan dalam pembangunan menurut Zamhariri 2008, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan.
2. Termanfaatkannya potensi sumberdaya sehingga memberikan manfaat Bagi pembangunan oleh pemerintah setempat (yang bersangkutan), dunia usaha dan masyarakat umum
3. Terlaksananya sejumlah investigasi dalam berbagai sektor
4. Terlaksananya langkah-langkah dalam melaksanakan kemudi dan dorongan bagi kegiatan dan investasi swasta.

Program pembangunan tidak hanya berpusat pada birokrasi melainkan berpusat kepada masyarakat atau komunitasnya sendiri. Pemberian kekuasaan pada inisiatif lokal dan partisipasi masyarakat menjadi kata kunci dalam pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat harusnya menerapkan prinsip-prinsip:

1. Transparansi (keterbukaan)

2. Partisipasi
3. Dapat dinikmati masyarakat
4. Dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas)
5. Berkelanjutan (*sustainable*)

Dalam hal ini pembangunan yang bertitik tolak pada pembangunan yang partisipatif dapat mendorong pengembangan sumberdaya manusia melalui pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pemberian kebebasan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan akan dapat memudahkan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang sesuai pada masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pembangunan yang telah disusun dengan responsivitas pemerintah

### **1.3Pembangunan Daerah**

Pembangunan dapat dimaknai sebagai suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar menuju ke arah yang lebih baik. Para ahli memberikan definisi pembangunan yang berbeda. Siagian dalam Riyadi (2004:4) memberikan pengertian pembangunan sebagai: Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Selanjutnya Siagian (1993) juga mengemukakan pembangunan pembangunan sebagai suatu perubahan mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari keadaan sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang baik secara kualitatif dan kuantitatif dan mutlak harus terjadi dalam pembanguan.Selanjutnya terdapat perbedaan yang sangat prinsipil antara pengertian wilayah dan daerah.

### **3. Musrenbang desa**

Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan desa untuk tahun anggaran berikutnya.Musrenbang-Desa bertujuan untuk menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan desa beserta pemilahnya. Pemilahan tersebut mencakup prioritas kegiatan desa yang dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat dan Alokasi Dana Desa (ADD), dibiayai melalui APBD kabupaten/kota atau APBD propinsi, dan sumber-sumber lain.

### **4.Perencanaan partisipatif**

Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat ( baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai suatu kesatuan. Suatu kesatuan untuk kepentingan rakyat, yang bila

dirumuskan dengan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusannya akan berpihak kepada rakyat Abe (2005:88) Melibatkan masyarakat dalam perencanaan merupakan suatu hal yang penting dalam keberhasilan suatu pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan memberi hasil yang lebih baik karena yang lebih tahu kebutuhan dan tuntutan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menganbarkan secara sistematika fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

### **Sumber Data**

Menurut arikunto(2002:107) bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data dapat di peroleh. menurut loflan san loflan (dalam moleong 2006:157) sumberdata utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan-tindakan, selebih nya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain

Ada dua jenis data yang digunakan didalam penelitian ini ,yaitu:

#### **1. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh dari responden dengan cara melakukan Tanya jawan secara langsung dan dipadu mellalu pertanyaan-pertanyaan yang sesuai fokus penelitian

#### **2. Data sekunder**

Adalah data yang diperoleh dari sumber informasi antara lain melalui:

a. Dokumen-Dokumen

b. Buku-buku referensi, hasil penelitian dan media masa yang relevan dengan fokus penelitian

Pemilihan dan penentuan sumber data dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, sebagai mana dinyatakan oleh sugiyono dalam suherman (2007:30) bahwa *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja, lebih lanjut menurut subagyo (2004:31) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan pertimbangannya ditentukan sendiri oleh peneliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan kata-kata yang bisa disusun dengan taks yang diperlukan sehinggah dengan demikian akan memperoleh informen dan menentukan key informen dalam penelitian

Informen adalah orang yang memberikan informasi, dengan pengertian ini maka informen dapat dikatakan sama dengan responden, apabila

pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak-pihak peneliti. Istilah “*informen*” ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif Arikunto (2002:122) untuk menentukan sampel data dalam penelitian ini ( dalam hal ini informen atau situasi social) menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* atau sampel bertujuan arikunto (2002:117) sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu dilakukan karena berbeda pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besardan jauh. walaupun cara seperti ini diperbolehkan, yaitu penelitian bisa menentukan sampel dengan tujuan tertentu dan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Pemilihan dan pengambilan sumber data penulis menggunakan key informen yaitu mengambil atau menunjuk pegawai pada lembaga tersebut yang dianggap dapat memberikan informasi secara akurat dan mewakili seluruh pegawai pada kantor tersebut. Adapun key informen dari penelitian ini adalah Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pujungan kecamatan pujungan Kabupaten Malinau. Untuk melengkapi data penulis dalam penelitian ini adapula informen yang meliputi, yakni; Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT, Tokoh Masyarakat di Desa long Pujungan kecamatan malinau kabupaten malinau.

Untuk menghimpun data di lapangan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Liberary Research*), yaitu :  
Menelusuri berbagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibuat, dan mempelajari literatur-literatur serta teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), yang meliputi :
  - a. Observasi yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap obyek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data. Cara ini di tempuh dengan mengamati baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk memudahkan perolehan data yang di inginkan.
  - b. Wawancara (*Interview*) yaitu mengadakan wawancara dengan informan untuk melengkapi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dokumen yaitu cara pengumpulan data dengan jalan mengamati, mencatat atau menepi dokumen-dokumen, buku panduan, arsip-arsip maupun data-data lain yang digunakan dengan maksud karena penelitian ingin memperoleh data sekunder yang erat kaitannya dengan fokus penelitian dan untuk menambahkan kelengkapan dalam menganalisis data penelitian.

Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi

dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru; data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal (Miles dan Huberman 2007:1-2)

### Hasil Penelitian

Desa long pujungan adalah sebuah desa yang merupakan desa adat yang berada di kecamatan pujungan kabupaten malinau. desa long pujungan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Paliran
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Ketaman
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Pua
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Long Aran

Luas wilayah desa long pujungan ( $\pm$  109.67 Ha) secara topografi, wilayah desa long pujungan berada pada daerah dataran rendah dan pegunungan sehingga pada saat ini kawasan didesa ini banyak difungsikan sebagai ladang oleh masyarakat.

### Jumlah Desa Long Pujungan Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan dan pembangunan desa yang mempunyai potensi. Berikut Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di desa Long Pujungan Dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.4  
Jumlah Desa Long Pujungan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah(Jiwa)
1.	Belum Sekolah	28 jiwa
2.	Tidak Pernah Sekolah	56 jiwa
3	Tidak Tamat Sekolah Dasar	44 jiwa
4.	Tamat Sekolah Dasar (SD)	150 jiwa
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	200 jiwa
6.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	96 jiwa
7.	D1 – D3	17 jiwa
8.	S1	15 jiwa
9.	S 2	-
	<b>Jumlah</b>	<b>606 jiwa</b>



*Sumber* : Profil Desa Long Pujungan 2013

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa penduduk di Desa Long Pujungan apabila dilihat dari tingkat pendidikan, didominasi oleh penduduk yang tamat sekolah Menengah pertama yang berjumlah 200 jiwa. Penduduk yang tamat sekolah dasar juga termasuk cukup tinggi yaitu berjumlah 150 jiwa. Sementara yang berpendidikan sarjana dan diploma hanya 32 jiwa dan kebanyakan merupakan pendatang yang berkerja di desa kecamatan pujungan. Hal ini menunjukkan sebagian besar penduduk di Desa Long Pujungan ini kurang memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan. Para orang tua lebih mengedepankan anak-anak mereka bekerja dari pada meneruskan sekolah yang lebih tinggi. Sehingga hal tersebut menyebabkan terbatasnya kemampuan dan keahlian mereka dalam dunia usaha dan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan khusus.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada responden di Desa Long Pujungan Kecamatan Pujungan Kabupaten Malinau yang berhubungan dengan Responsifitas Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah (Studi kasus di desa long pujungan kecamatan pujungan kabupaten malinau). penulis menjabarkan ke dalam beberapa indikator yang di uraikan menjadi beberapa pertanyaan-pertanyaan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden di Desa Long Pujungan, maka menghasilkan data sebagai berikut :

#### **1. Responsifitas Pemerintah dalam Pembangunan Daerah (studi kasus di desa long pujungan kecamatan pujungan kabupaten malinau).**

Dalam setiap pembangunan, untuk mendapatkan tujuan yang maksimal demi kesejahteraan masyarakat banyak. Sudah seharusnya melibatkan masyarakat selaku penerima pembangunan tersebut dalam hal ini Responsifitas pemerintah Daerah (desa) merupakan kemampuan dalam mengantisipasi dan menanggapi aspirasi baru, kebutuhan baru dan tuntutan baru dari masyarakat dalam musrenbang di tingkat desa

Sesuai dengan fokus penelitian Responsifitas Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah ( studi kasus didesa long pujungan kecamatan pujungan kabupaten malinau ), Maka dalam pembahasan kali ini Responsifitas pemerintah daerah (pemerintah desa) pada musrenbang desa terutama dalam segi pembangunan infrastruktur dibagi menjadi 4 item, yaitu:

#### **a. Masalah Atau Tuntutan Serta Keinginan Dari Masyarakat Pada Musrenbang Desa Pada Tahun 2011**

Masalah atau keinginan serta tuntutan dari masyarakat pada Musrenbang Desa, yang dimaksud disini adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat ( baik secara langsung maupun tidak langsung). yang bila dirumuskan dengan

tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusannya akan berpihak kepada rakyat, Masalah atau keinginan serta tuntutan dari masyarakat dalam pada Musrenbang Desa merupakan suatu hal yang penting dalam keberhasilan suatu pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan Masalah atau keinginan serta tuntutan akan memberi hasil yang lebih baik karena yang lebih tahu kebutuhan dan tuntutan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga sangat penting apabila partisipasi masyarakat dalam menyampaikan Masalah atau keinginan serta tuntutan lebih ditingkatkan.

Berdasarkan data-data yang ada diatas dan pengamatan dilapangan bahwa Responsifitas Pemerintah daerah (desa) dalam menanggapi usulan atau tuntutan serta keinginan dari masyarakat khususnya pada tahun 2011 Pemerintah masih sangat kurang menanggapi aspirasi,kebutuhan,serta tuntutan dari masyarakat didesa long pujungan terutama dalam lingkup usulan dari RT yang ada di desa long pujungan ini, Hal ini disebabkan karena pemerintah desa mementingkan usulan pembangunan yang merupakan skalah prioritas dari desa,maka dari pada itu masalah,tuntutan serta keinginan dari masyarakat tidak semuanya mendapatkan perhatian dari pemerintah desa dimana dapat dilihat dari rata-rata masalah,tuntutan serta keinginan dari masyarakat ada empat usulan. Tetapi yang diterima oleh pemerintah desa hanya ada satu sampai dua usulan saja yang diterima oleh pemerintah dalam musrenbang desa.

#### **b. Perencanaan dari Musrenbang desa pada tahun 2011**

Perencanaan dari musrenbang desa dalam hal ini berupa proses perencanaan musrenbang Desa harus melibatkan melibatkan pemerintah desa,tokoh masyarakat serta Badan perwakilan desa sesuai fungsinya masing-masing. Keterlibatan Takoh masyarakat serta badan perwakilan desa (BPD) selaku perwakilan dari masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat secara langsung, yaitu perencanaan yang langsung disusun bersama, maupun perencanaan yang disusun melalui mekanisme perwakilan sesuai dengan institusi yang sah.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara yang didapat dilapangan dapat penulis simpulkan bahwa Responsifitas pemerintah daerah (desa) Dalam perencanaan Musrenbang desa di desa long pujungan belum cukup baik dikarenakan perencanaan musrenbang desa masih sangat kurang mendapatkan Responsifitas oleh pemerintah desa, dalam hal ini pemerintah desa hanya memberitahukan kepada segelintiran orang tertentu saja dalam membahas pembangunan di desa long pujungan ini,terkadang pemberitahuan baik itu sifatnya secara lisan mau pun tulisan tidak ada kepada Ketua serta anggota badan perwakilan desa (BPD) yang mana mereka merupakan perwakilan dari masyarakat di dalam pemerintahan di desa long pujungan ini.

#### **c.Usulan Program Pada Tahun 2011**

Usulan Program dalam hal ini berupa usulan pada musrenbang desa yang berupa usulan yang bermula dari masyarakat dimana Dalam menyampaikan usulan yang mereka inginkan sangat penting peran serta dari masyarakat itu sendiri karena yang lebih tahu kebutuhan dan tuntutan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri.

Dari hasil penelitian dilapangan dimana Responsifitas pemerintah daerah (desa ) dalam menanggapi Usulan Program dari Masyarakat masih belum baik. dapat dilihat bahwa Responsifitas atau kemampuan pemerintah daerah (desa) dalam mengantisipasi dan menanggapi aspirasi baru, kebutuhan baru dan tuntutan baru dari masyarakat dalam musrenbang di tingkat desa masih sangat kurang dimana dari sekian banyak usulan dari masyarakat dalam pra musrenbang desa long pujungan pada tahun 2011 hanya sebagian kecil dari usulan masyarakat yang diterima oleh pemerintah daerah (desa) dalam musrenbang desa.

Dimana dalam hal ini pemerintah desa lebih mementingkan rencana pembangunan yang telah direncanakan oleh mereka dari pada menanggapi aspirasi, kebutuhan serta tuntutan yang telah disampaikan oleh masyarakat dalam Pra musrenbang desa.

#### **d. Pelaksanaan program dari pemerintah daerah Pada Musrenbang pada tahun 2011**

Dalam pelaksanaan perogram dari pemerintah daerah dalam hal ini khususnya didesa, Pelibatan dari masyarakat pada setiap tahapan pembangunan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan dan pemeliharaan akan sangat membantu dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Dimana pelibatan dari masyarakat baik secara langsung maupun perwakilan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana dengan adanya pelibatan dari Masyarakat, masyarakat akan menyadari bahwa pebangunan tersebut memang untuk mereka sendiri, sehingga mereka akan merasa ikut memiliki, karena apa yang di inginkan oleh masyarakat merupakan usulan dari mereka pada musrenbang. Dengan adanya musrenbang desa pengelolaan/pengembangan sarana dan perasarana diharapkan dapat dilaksanakan melalui peran serta masyarakat yang lebih besar lagi. Dimana Pelaksanaan program dari pemerintah daerah pada tahun 2011 ini apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat atau masih belum maksimal.

Dari hasil penelitian dilapangan mengenai Responsifitas pemerintah daerah (desa) dalam pelaksanaan program dari musrenbang desa terutama dalam pembangunan pada tahun 2011 Masih sangat Jauh dari apa yang diinginkan oleh masyarakat. Di Karena pembangunan yang ada di desa ini sangat sedikit yang merupakan perogram pembangunan yang berasal dari usulan masyarakat, dimana pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2011 masih belum maksimal dilaksanakan oleh pemerintah daerah (desa) antara lain yang paling mencolok adalah dari segi sumber daya manusia, ekonomi Dan Infrastruktur didesa Long Pujungan. Dimana pemerintah daerah (desa) selalu mengutamakan usulan yang

sifatnya adalah prioritas dari desa, sehingga pembangunan tersebut tidak berarti bagi masyarakat di desa long pujungan.

## **Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dari Responsifitas Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah**

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1. Dukungan dari Masyarakat Desa long Pujungan**

Dukungan dari masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan di long pujungan dimana dukungan dari masyarakat sangat diharapkan selama proses pembangunan dimana jika ada dukungan dari masyarakat maka apa yang menjadi tujuan dari pemerintah akan terwujud dengan baik, dalam hal ini Responsifitas pemerintah daerah (desa) Dapat terwujud dengan baik.

### **b. Faktor Penghambat**

#### **1. sosial budaya**

Dalam hal ini segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam masyarakat termasuk didalamnya pernyataan intelektual, dan nilai-nilai arististik yang menjadi ciri khas masyarakat tersebut.

#### **2. Anggaran dari pemerintah daerah**

Anggaran dalam hal ini berupa anggaran pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah dimana didalam pencairannya terjal dalam beberapa tahap, hal ini yang menjadi suatu kendala dalam proses pembangunan dikarenakan jarak yang cukup jauh dari pemerintahan kabupaten malinau

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di lapangan yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya mengenai Responsifitas pemerintah dalam pembangunan daerah studi kasus di desa long pujungan kecamatan pujungan kabupaten malinau. Dimana pemerintah daerah (desa) sangat kurang dari segi kemampuan dalam mengantisipasi dan menanggapi aspirasi baru, kebutuhan baru dan tuntutan baru dari masyarakat dalam musrenbang di tingkat desa, maka pada bab ini penulis secara garis besar menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa responsifitas pemerintah sangat berpengaruh terhadap Masalah atau keinginan serta tuntutan dari masyarakat, dimana masalah atau keinginan serta tuntutan dapat terwujud jika pemerintah daerah (desa) menanggapi aspirasi dari masyarakat, maka apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pemerintah desa khususnya di desa long pujungan ini.
2. Dimana perencanaan dari Musrenbang desa pada tahun 2011 masih belum baik, dimana perencanaan musrenbang masih dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara umum namun hanya melibatkan sekelompok orang saja-

terutama di desa long pujungan ini pemerintahan desa masih sangat kaku dalam perencanaan pembangunan sehingga perencanaan pembangunan yang dirumuskan jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat.

3. Bahwa usulan program yang di laksanakan pada tahun 2011 masih sangat bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, dimana pemerintah daerah (desa) sangat kurang menanggapi apa yang menjadi usulan program dari masyarakat di Desa long Pujungan ini sehingga masyarakat di Long Pujungan tidak menikmati pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2011 dikarenakan pembangunan tersebut bukan yang dibutuhkan oleh mereka.
4. Pelaksanaan program dari Musrenbang pada tahun 2011 masih belum maksimal dilakukan oleh pemerintah daerah (desa) terutama di bidang pembangunan infrastruktur yang ada di desa ini, dimana pembangunan yang di laksanakan pada tahun 2011 bukan merupakan usulan dari masyarakat melainkan usulan dari pemegang kepentingan di desa long pujungan itu sendiri sehingga pembangunan di desa ini tidak ada kemajuan terutama pada tahun 2011.
5. Faktor pendukung dari Responsifitas pemerintah dalam pembangunan daerah studi kasus di desa long pujungan kecamatan pujungan kabupaten malinau ini adalah dukungan dari seluruh masyarakat Desa long pujungan. Sehingga Responsifitas pemerintah desa dapat terjalin dengan baik dalam hal pembangunan di desa serta hal-hal yang meyangkut responsifitas dapat terjalin sehingga kepentingan desa lainnya bisa diwujudkan dengan baik.
6. faktor penghambat dari Responsifitas pemerintah dalam pembangunan daerah di long pujungan ini adalah faktor sosial budayah masyarakat di desa long pujungan yang masih sangat kental, dimana mereka masih sangat memegang nilai-nilai budayah mereka sehingga perubahan sangat sulit terjadi didesa long pujungan ini. Dimana Faktor Penghambat yang sangat kentarah didesa long pujungan ini selain dari sosial budayah ada faktor Anggaran dari pemerintah Daerah, dimana anggaran yang di berikan sangat kurang sehingga dengan kurangnya anggaran yang diberikan akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan. Terbatasnya ruang gerak pemerintah desa dalam pembangunan karena kurangnya anggaran yang ada.

#### **Daftar Pustaka**

- Budiman, Arief. 2000, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Bratakasuma.D.S. 2004.*Perencanaan Pembangunan Daerah*.Gramedia, Jakarta
- \_\_\_\_\_.1945.Undang-Undang Dasar Pasal 18 *Tentang Pemerintahan Desa*

\_\_\_\_\_,2002.*kamusbesarbahasaindonesia*.jakarta :balaipustaka

\_\_\_\_\_,2004undang-undang No.32,pasal 1 ayat 2 Pemerintahdaerah

Dwiyanto,Agus.1995, *Kinerja Organisasi Publik, Lebihkan dalam penerapannya*.(makalah)

Fakih, Mansour. 2001. *Runtuhnya teoripembangunan*, Insistpress, Yogyakarta

Miles,B Mathew dan A. Michael Hubermen. (2009).*Analisis Data kualitatif*.jakarta

Prof.Drs.haw.widjaja.2003,*Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Aslih Bulat Dan Utuh*.Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada

Purwosantoso,2007.*Membangunsistimperwakilanrakyat yang responsive*,Yogjakarta.(Makalah)

Surianingrat, Bayu.1992. *Mengenalilmupemerintahan*.Jakarta.rienekscipta

#### **Dokumen:**

Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) KabupatenMalinau 2011- 2016

RPJMD ProvinsiKaltim 2008-2013 dan RPJM nasionaltahun 2009-2014

Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Malinautahun 2005-2025

Undang-UndangDasarRepublik Indonesia Tahun 1945pasal 1 ayal 5 otonomidaerah.

#### **Sumber Iternet:**

[http://patawari.wordpress.com/2009/05/14/profesionalisme-aparatur pemerintahkota/](http://patawari.wordpress.com/2009/05/14/profesionalisme-aparatur-pemerintahkota/)(diakses 9 september 2012)

<http://www.google.co.id/search?client=opera&rls=en&q=dasar+hukum+respon sifitas&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8>Membangun (diakses 9 september 2012)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18279/3/Chapter%20II>.(diakses 9 september 2012)